

# **RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUNGAI PINANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
KECAMATAN SUNGAI PINANG  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025.

Rencana kerja perangkat daerah ini merupakan dokumen acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan di Kecamatan Sungai Pinang untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Renja disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan guna mendukung pencapaian Visi Misi yang telah dirumuskan serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan pula dapat menjadi acuan bagi segenap unsur Kecamatan Sungai Pinang sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan. Terima kasih.

Sungai Pinang, 29 Juli 2024  
Camat Sungai Pinang



**MARWATA, SE**

NIP. 196902171989031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI ..... iii

DAFTAR TABEL .....v

BAB I ..... 1

PENDAHULUAN ..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum ..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

1.3.1 Maksud ..... 4

1.3.2 Tujuan..... 4

1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II ..... 6

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN (N-1)

..... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan ..... 6

2.1.1.Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun 2024 ..... 10

2.1.2.Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun Lalu (Tahun 2023) ..... 23

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang..... 23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ..... 27

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kecamatan Sungai Pinang ..... 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 38

BAB III ..... 39

TUJUAN SASARAN KECAMATAN ..... 39

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 39

3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2025..... 39



3.1.2 Prioritas Nasional ..... 40

3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan ..... 40

3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan  
Kabupaten Banjar Tahun 2024 ..... 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan ..... 46

3.3. Program dan Kegiatan..... 47

3.3.1.Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan  
Program dan Kegiatan..... 51

3.3.2.Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan ..... 51

**BAB IV ..... 53**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ..... 53**

**BAB V ..... 71**

**PENUTUP ..... 71**

**LAMPIRAN ..... 73**

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang sampai Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Banjar	26
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar	53
2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Banjar	57
3.1.	Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan	77
3.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Pinang	79
4.1.	Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	86

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Sungai Pinang untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Sungai Pinang didasarkan pada Renstra Kecamatan Sungai Pinang 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025 serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang serta sejalan dengan visi Kabupaten Banjar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar yaitu “***Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis***”, maka Kecamatan Sungai Pinang mendukung pencapaian misi 4 yaitu Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.

Adapun tahapan penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 Kecamatan Sungai Pinang, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Sungai Pinang berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
3. Penyusunan Rancangan Rencana kerja Tajun 2025 Kecamatan Sungai Pinang berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Pinang dan rancangan awal
4. Pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Sungai Pinang dengan Tim Forum SKPD (TAPD) untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 Kecamatan Sungai Pinang berdasarkan Perkada RKPD awal
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan Sungai Pinang untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah



- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun



- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5)
  13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024
  14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 26)
  15. Peraturan Bupati Banjar No. ... tentang PERUBAHAN kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Sungai Pinang ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra 2022-2026, dan RPJMD Kecamatan Sungai Pinang di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 ini adalah :

- a. Menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Sungai Pinang dan RPJMD Kabupaten Banjar di Tahun 2022-2026;
- c. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan Laporan kinerja.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Di dalamnya terdapat Latar belakang, Maksud dan tujuan, Landasan hukum, serta sistematika penulisan.

### BAB II. Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun Lalu

Memuat informasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPd, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Pinang

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD Kecamatan Sungai Pinang

### BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sungai Pinang

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPd, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup berupa; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN (N-1)

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang

Pada tahun 2023 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang mengampu Urusan Kecamatan melaksanakan 6 (enam) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
  - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
  - a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
  - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
  - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
  - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

## 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian realisasi anggaran belanja langsung Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.**1.986.704.264** (Satu milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh enam juta tujuh ratus Empat ribu Dua Ratus Enam puluh Empat rupiah) atau sebesar **81,70%** dari pagu anggaran sebesar Rp. **2.227.724.650,-** (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Tujuh Ratus Dua puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah ).

Adapun tingkat capaian kinerja untuk tahun **2023** sebesar **93,85%** dengan rincian capaian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran :
  - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi 97,96% dari target 100%.
  - b) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan realisasi 90% dari target 100%.
  - c) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan realisasi 50% dari target 100%.
  - d) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan realisasi 0% dari target 100%.
  - e) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan realisasi 83,33% dari target 100%.
  - f) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan realisasi 83,33% dari target 100%.
  - g)
2. Realisasi program/kegiatan yang **memenuhi** target kinerja hasil/keluaran:
  - a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
  - b) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
  - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
  - d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%

- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
  - f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
  - g) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan realisasi 100% dari target 100%
  - h) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan realisasi 100% dari target 100%
  - i) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi 100% dari target 100%
  - j) Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
  - k) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan realisasi 100% dari target 100%
  - l) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan realisasi 100% dari target 100%
  - m) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi 100% dari target 100%
  - n) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi 100% dari target 100%
3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** dari target kinerja hasil/keluaran terjadi pada indikator sasaran program:
- Tidak ada program/ kegiatan yang melebihi target
4. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu :
- a) Faktor penyebab **tidak** tercapainya target kinerja :
    - Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal
    - Keterbatasan anggaran dan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja. Pensiunnya PNS yang mengampu Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
  - b) Faktor penyebab **terpenuhinya** target kinerja :
    - Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan

- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
  - Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Sungai Pinang, yaitu:
- Dengan adanya rasa tidak puas yang diterima oleh masyarakat/pengguna layanan maka menyebabkan sasaran indikator program indeks kepuasan masyarakat tidak bisa mencapai target yang ditentukan. Sehingga berimplikasi negative terhadap capaian Renstra Kecamatan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu:
- Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
  - Meningkatkan kemampuan, sumber daya, dan kualitas dalam pengelolaan dan pelaporan perencanaan dan keuangan
  - Berkoordinasi dengan setiap SKPD di Kabupaten dalam merencanakan kegiatan di Tahun berikutnya.
  - Membuat inovasi yang semakin mempermudah masyarakat mendapatkan layanan baik itu perizinan maupun non perizinan.
  - Perlu ada penambahan sarana dan prasarana pelayanan dan tenaga yang menguasai teknologi
  - Meningkatkan koordinasi dari Dinas terkait untuk lebih mengembangkan inovasi yang ada.

## **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun 2024**

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada perbedaan terkait dengan nomenklatur program/kegiatan dan adanya penambahan sub kegiatan pada semua SKPD termasuk Kecamatan Sungai Pinang, namun demikian untuk Indikator dari kegiatan yang sekarang menjadi indikator pada sub kegiatan masih tetap sama. Pada tahun anggaran 2024, Kecamatan Sungai Pinang melaksanakan 6 (enam) Program 15 (Lima belas) Kegiatan 41 (empat puluh satu) Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari:
    - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2. Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - 1.1.3. Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - 1.1.4. Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 1.1.5. Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    - 1.1.6. Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - 1.1.7. Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari:
    - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - 1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari:
    - 1.3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    - 1.3.2. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD



- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari:
  - 1.4.1. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - 1.4.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari:
  - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.5.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.5.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - 1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
  - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
  - 1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.8.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari:
  - 2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan terdiri dari:
    - 2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - 2.2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari:
    - 2.2.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari:
  - 3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari:
    - 3.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - 3.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
  - 4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
    - 4.1.1. Sub Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    - 4.1.2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
  - 4.2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdiri dari:
    - 4.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari:
  - 5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari:
    - 5.1.1. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari:

6.1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari:

6.1.1. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

6.1.2. Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.3. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

6.1.4. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

6.1.5. Sub Kegiatan Fasilitas Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Total pagu dana untuk melaksanakan 6 (enam) Program 15 (Lima belas) Kegiatan dan 41 (Empat puluh satu) Sub Kegiatan tersebut pada Kecamatan Sungai Pinang adalah sebesar Rp. **2.549.505.648,-** (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah ).

Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ini disusun berdasarkan analisis kondisi obyektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi oleh perangkat Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar pada tahun berjalan atau tahun-tahun yang akan datang.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan

dengan masing-masing indikator, guna mendukung pencapaian misi Bupati yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis”**. Dengan Total anggaran 6 Program, 15 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan adalah sebesar Rp. **2.227.724.650,-** (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Tujuh Ratus Dua puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah ). dengan capaian realisasi sebesar Rp.**1.986.704.264** (Satu milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh enam juta tujuh ratus Empat ribu Dua Ratus Enam puluh Empat rupiah) atau sebesar 89,18%.

Sedangkan untuk Tahun 2024 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar melaksanakan 6 (enam) Program 15 (Lima belas) Kegiatan dan 41 (Empat puluh satu) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. **2.549.505.648,-** (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah dengan capaian realisasi sampai dengan Triwulan II (dua) adalah sebesar Rp. 936.171.839,-. (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan) atau sebesar 43.85%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2023 dan realisasi sampai dengan tahun 2024 triwulan ke II (dua) sebagai berikut :



**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang sampai Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Banjar**

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIRPERIODE RENSTRA SKPD 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
						Target Renja 2023	Realisasi Kinerja 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3		4 RENTRA SUDAH	5 IKKI LKJIP	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9) SAMA 9	11=(10/4)*100	
7		UNSUR KEWILAYAHAN										
71		KECAMATAN										
711		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	Skor/ Indeks	80	63,97	74	63,97	86,44594595	76	203,94	254,925
7112.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
7112.01.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang Tersusun	Dokumen	30	6	6	6	100	6	18	60
7112.01.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60
7112.01.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60
7112.01.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60
7112.01.5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60
7112.01.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	3	NA	NA	NA	NA	3	75

71112.016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	NA	3	3	100	4	7	43,75
71112.017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	NA	NA	NA	NA	2	100
71112.017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	NA	2	2	100	2	4	50
71112.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
71112.021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	14	14	14	14	100	14	14	100
71112.023	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	2	2	2	100	12	16	26,7
71112.025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	1	1	1	100	1	3	75
71112.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
71112.035	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	4	4	4	100	1	9	180
71112.036	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	1	1	1	100	4	6	30
71112.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
71112.055	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	2	1	NA	NA	NA	NA	1	50
71112.055	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	8	NA	1	1	100	2	3	37,5
71112.0511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	1	0	0	0	1	2	33,3
71112.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
71112.061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	5	5	5	100	5	15	60



71112.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	43	1	1	100	1	45	1125
71112.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	7	10	10	100	10	27	54
71112.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	125	0	0	0	0	25	25	20
71112.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	12	3	3	100	3	18	120
71112.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	0	0	0	0	0	0	0
71112.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	0	0	0	0	0	0
71112.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	0	0	0	0	0	0	0
71112.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	12	12	12	100	12	36	75
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
71112.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
71112.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	3	2	2	100	2	7	58,33333333
71112.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
71112.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	12	12	12	100	1	25	625
71112.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0
71112.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100	12	36	60
71112.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	12	1	1	100	1	14	280
71112.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
71112.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	0	0	0	0	0	0	0
71112.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Bulan	12	0	0	0	0	0	0	0



					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
7111	12.09	2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	bulan	12	7	NA	NA	NA	NA	7	58,3
7111	12.09	2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	NA	7	7	100	NA	7	19,4
7111	12.09	6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	4	0	0	0	1	5	166,6666667
7111	12.09	6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bulan	13	0	0	0	0	0	0	0
7111	12.09	9			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2	2	2	100	1	5	166,6666667
7111	12.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	0	0	0	0	0	0
712		2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7122	01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7122	01	1			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	0	0	2	0	0	0	0	0
7122	01	2			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	0	0	0	0	0	5	5	0
7122	02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7122	02	3			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	0	2	0	0	2	2	20

7122.03			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7122.03	1		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0
7122.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7122.04	1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0
7122.04	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0
7122.04	3		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	29	6	4	4	100	7	17	58,62068966
713		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7132.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7132.01	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa	11	2	NA	NA	NA	NA	2	18,2
7132.01	1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	38	NA	11	11	100	11	22	57,9
7132.01	2		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0
7132.01	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	2	2	2	100	3	7	70
7132.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	100	0	100	100	100	100	100	100

7132.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0	0
7132.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0
7132.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	0	100	100	100	100	100	100
7132.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0
7132.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	0
714		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7147.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7142.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	11	4	1	1	100	3	8	72,72727273
7142.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	10	1	2	2	100	2	5	50
7142.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7142.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	8	2	1	1	100	1	4	50
7142.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	Persen	100	0	100	100	100	100	100	100
7142.04	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0

				Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												
715				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
715	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
715	2.01	1		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	160	45	50	50	100	40	135	84,375			
715	2.01	1		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan	1	0	1	1	100	0	1	100			
715	2.01	2		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
715	2.01	5		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
715	2.01	7		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	10	0	2	2	100	2	4	40			
715	2.01	8		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	10	0	10	10	100	0	10	100			

716				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	0	100	100	100	100	100	100
716	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
716	2.01	1		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100
716	2.01	2		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5	0	0	0	0	1	1	20
716	2.01	3		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	5	2	2	2	100	1	5	100
716	2.01	5		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	0	1	1	1	100	0	2	0
716	2.01	6		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	2	1	1	1	100	0	2	100
716	2.01	7		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60
716	2.01	8		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0
716	2.01	15		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	5	0	1	1	100	1	2	40

**Sumber:**

- LKJIP Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2023
- Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Kab. Banjar 2024

Jika melihat realisasi capaian kinerja 6 (enam) Program, 15 (Lima belas) Kegiatan dan 39 (Tiga puluh Sembilan) Sub Kegiatan pada Kecamatan Sungai Pinang sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 di atas, dimana capaian Tahun 2023 sebesar 93,85% untuk semua program/kegiatan/subkegiatan subkegiatan, sedangkan capaian realisasi sampai dengan triwulan II masih di bawah 39,36% untuk semua program/kegiatan/sub kegiatan karena perkiraan bahwa target capaian akhir untuk program, kegiatan dan sub kegiatan tercapai di Triwulan IV/akhir.

### **Capaian Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun Lalu (Tahun 2023)**

Tahun 2023 merupakan awal dari pelaksanaan rencana kerja tahunan di periode Renstra Kecamatan Sungai Pinang 2021-2026. Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja 2023 yang telah dilaporkan pada Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2023 maupun Laporan Petanggungjawaban Kerja Tahun 2023, terlihat bahwa capaian target program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2023 jika di banding dengan target kinerja pada akhir periode Renstra 2021-2026 sampai dengan tahun berjalan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 di atas capaiannya **cukup bagus** sehingga dengan melihat kondisi ini maka optimis target akhir Renstra bisa tercapai.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang**

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan. Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar tidak memiliki IKK, NSPD maupun SPM, termasuk di dalamnya Kecamatan Sungai Pinang Sehingga dalam hal ini Kecamatan sebagai perangkat daerah tidak memiliki indikator SPM, IKK, dan NSPK, maka untuk analisis kinerja pelayanan kaitannya dengan pencapaian target, maka digunakan indikator tujuan dan indikator sasaran Renstra Kecamatan Sungai

Pinang, sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan pelayanan publik.

Berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021-2026 Indikator Kinerja utama dan target sasaran pada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang terdapat pada table 2.2. di bawah ini :



**Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Pinang Kalimantan Selatan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar**

No	Indikator Tujuan/Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten			85	86	87	87	85,41	86,41	87,41	88,41	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara.
1.1	Nilai Evaluasi Kecamatan			73	84	85	85	83,62	84,62	85,62	86,62	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.

Sumber data :  
- Matriks Renstra Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2023 yang terdiri dari indikator sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2, bisa memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Realisasi Tahun 2023 bisa melampaui target yang ditetapkan dimana realisasi kinerja indikator Nilai Evaluasi Kecamatan Pada Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang dengan Sasaran target 2024 sebesar **77**.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari faktor penghambat dan faktor pendukung sebagai berikut :

**Faktor penghambat:**

- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan,
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada Pemerintah Kecamatan Cintapuri Darussalam sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa belum maksimal,
- Kurangnya pemahaman pegawai tentang tugas pokok dan fungsinya dikarenakan kurang jelas dan detail menyangkut uraian tugas masing-masing personil sehingga seringkali terjadi tumpang tindih tanggung jawab pekerjaan
- Seringnya pemadaman listrik yang menyebabkan terhentinya aktivitas karena banyak peralatan yang bergantung pada tersedianya listrik agar dapat berfungsi dan tugas-tugas lainnya pula memerlukan Listrik
- Infrastruktur Jalan yang kurang baik menghambat pergerakan serta kegiatan tak berlangsung lancar
- Koneksi internet yang tidak stabil menghambat berbagai urusan layanan masyarakat dan laporan ke instansi pemerintah secara online yang tentu saja mengharuskan adanya koneksi internet yang stabil.

**Faktor pendukung:**

- Terjalannya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah dengan masyarakat dan stakeholder lainnya.
- Koordinasi yang baik secara terus menerus antar pegawai meningkatkan dan menjaga efektivitas organisasi semaksimal mungkin dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan kerja interdependen yang beragam.

- Perencanaan yang baik terhadap pekerjaan yang akan dikerjakan. Terasilitasinya sebagian besar prasarana yang di perlukan dalam menunjang kegiatan.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Kecamatan Sungai Pinang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Isu Strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan perangkat daerah.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Sungai Pinang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

- Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan administratif.
- Keterbatasan SDM dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Etos Kerja SDM dalam memberikan pelayanan.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan dan ketersediaan peralatan Komputer.
- Belum maksimalnya sarana dan prasarana berupa bangunan dan ketersediaan signal internet yang memadai.
- Belum maksimalnya tata kelola dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sungai Pinang adalah :

- Adanya perubahan RENJA SKPD yang sudah sesuai dengan program di Kabupaten.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecamatan Sungai Pinang akan berhasil mencapai target kinerja jika didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adanya sinergi antar bidang di SKPD Kecamatan Sungai Pinang itu sendiri. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan :

- SDM aparatur yang tersedia di SKPD Kecamatan Sungai Pinang sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 adalah :

- Ketersediaan SDM yang belum mencukupi dan berkualitas serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan public, serta yang mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan
- Berbagai dinamika perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak pada prioritas kebijakan perencanaan daerah
- Pembinaan terhadap pegawai yang berorientasi pada pelayanan

## **2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Kecamatan Sungai Pinang**

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan serta subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Sungai Pinang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Sungai Pinang, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta kemampuan keuangan daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi terhadap ada atau tidaknya perbedaan antara program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/subkegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/subkegiatan yang terdapat pada

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Analisa terkait perbandingan antara rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 dengan hasil analisis Kebutuhan Kecamatan Sungai Pinang dengan memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut di atas, serta catatan jika terdapat perbedaan baik itu perbedaan terkait rumusan program/kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian maupun perbedaan pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :

**Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Banjar**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sungai Pinang Kab Banjar	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	NA	Rp2.374.758.426	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sungai Pinang Kab Banjar	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang	78	Rp2.478.354.188	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 Persen	Rp6.896.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100 Persen	Rp8.207.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp771.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	Rp1.107.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp1.120.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	NA	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	NA	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp520.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	NA	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp1.120.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	NA	NA	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp1.665.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp5.000.000	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp1.200.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp2.100.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Rp1.861.833.126	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Rp1.861.576.128	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ Bulan	Rp1.828.218.126	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/ Bulan	Rp1.811.216.128	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp32.750.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp49.560.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp865.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp800.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 Persen	Rp9.854.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 Persen	Rp12.350.000,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp854.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp350.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp9.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp12.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 Persen	Rp22.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 Persen	Rp25.770.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Rp2.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp770.000	



Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	Rp20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	Rp25.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Rp128.540.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Rp123.793.800	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp756.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp739.500	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp8.824.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	NA	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	Rp1.966.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp1.305.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Rp4.110.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp3.500.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp2.884.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp2.760.300	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	NA	NA	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	Rp5.489.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp110.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp110.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100 Persen	Rp13.200.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100 Persen	Rp85.512.000	
Pengadaan Mebel	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	NA	Pengadaan Mebel	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Rp17.888.000	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp13.200.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Rp67.624.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Rp211.960.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Rp223.671.260	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 1.750.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp34.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp52.786.260	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp175.960.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp169.135.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat daerah	100 Persen	Rp120.474.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat daerah	100 Persen	Rp137.474.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sungai Pinang Kab Banjar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	Rp92.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sungai Pinang Kab Banjar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	Rp83.800.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Rp8.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Rp19.930.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp20.424.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp33.744.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana Nilai Evaluasi Kecamatan	100 Persen	Rp16.324.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana Nilai Evaluasi Kecamatan	100 Persen	Rp42.648.800	

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	Rp3.570.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	Rp20.302.800	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Rp3.570.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Rp20.302.800	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	Rp12.754.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	Rp22.346.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 Laporan	Rp12.754.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Rp22.346.000	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	Rp47.448.500	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persen	Rp60.796.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100 Persen	Rp47.448.500	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	100 Persen	Rp60.796.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Kemasyarakatan	Rp8.538.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21 Lembaga Kemasyarakatan	Rp7.932.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Rp38.910.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Rp52.864.000	

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100 Persen	Rp50.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100 Persen	Rp24.957.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 Persen	Rp40.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 Persen	Rp20.196.500	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Rp25.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Rp11.535.500	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	Rp15.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Rp8.661.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100 Persen	Rp10.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100 Persen	Rp4.760.500	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	Rp10.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	Rp4.760.500	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp142.350.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	Rp153.069.900	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 Persen	Rp142.350.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 Persen	Rp153.069.900	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	40 Orang	Rp60.350.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	40 Orang	Rp58.064.000	

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	Rp82.000.000	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Rp95.005.900	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	Rp11.720.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 Persen	Rp27.720.400	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100 Persen	Rp11.720.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100 Persen	Rp27.720.400	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp1.950.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp1.991.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Rp1.900.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Rp1.847.700	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp2.350.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp2.308.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	NA	NA	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	Rp19.800.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	NA	NA	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	NA	NA	

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	Rp1.800.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	Rp1.749.700	
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	Rp3.720.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Sungai Pinang Kab Banjar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	NA	NA	

**Sumber Data : Rancangan awal RKPD dan Renstra**

Dari table 2.3 di atas dapat terlihat bahwa ada perbedaan antara hasil review rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Kecamatan Sungai Pinang Perbedaan terkait dengan indikator pada program penunjang, dan beberapa perbedaan pagu dana pada beberapa program/kegiatan dan sub kegiatan. Penjelasan singkat terkait jika terdapat perbedaan-perbedaan tersebut di atas bisa dilihat pada kolom catatan penting pada Tabel 2.3 di atas.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan /subkegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Pokir Dewan, LSM maupun usulan langsung dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan hal ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar termasuk Kecamatan Sungai Pinang tidak ada menerima usulan program dan kegiatan/subkegiatan dari masyarakat. Kecamatan hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat yang sudah melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kecamatan dan Musenbang Kabupaten yang diusulkan para pemangku kepentingan/masyarakat.



### **BAB III**

## **TUJUAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI PINANG**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2024 merupakan Prioritas Pembangunan yang mengacu pada kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP 2024. Selain itu prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2024 harus berdasarkan prioritas yang telah dirumuskan dan dikaitkan dengan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026.

Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, serta isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

#### **3.1.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2025**

Prioritas Pembangunan disusun berdasarkan isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Banjar tahun 2025 yang memperhatikan pada Prioritas Nasional dan Provinsi serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten



Banjar Tahun 2021-2026.

### 3.1.2 Prioritas Nasional

Tahun 2025 merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJMN Tahun 2025-2029, arah kebijakan difokuskan pada Perkuatan Fondasi Transformasi. Perkuatan transformasi meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
4. Penguatan Daya Saing Usaha
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

### 3.1.3 Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 yaitu **“Pemantapan Kualitas Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian melalui intensitas kerjasama yang Mendukung Pembangunan”**. Merujuk pada kebijakan nasional dan isu-isu strategis yang telah dirangkum, maka tema Pembangunan RKPD Tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian menjadi : **“Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan”**.

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dijabarkan ke dalam 5 Prioritas Daerah sebagai berikut :

1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan
2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
3. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana

#### **3.1.4 Tema, Prioritas Daerah, Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2025**

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 berpedoman pada sasaran dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2025 adalah “Pemantapan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing dalam Mendukung Kesiapan Logistik Kalimantan”.

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Adapun Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, dan Provinsi adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.1. Persandingan Tema RKP, Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan**

<b>RKP NASIONAL</b>	<b>RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>RKPD KABUPATEN BANJAR</b>
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan	Pemantapan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing dalam Mendukung Kesiapan Logistik Kalimantan

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD, terdiri dari sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan tema tersebut, fokus pembangunan yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Ekonomi Kerakyatan
4. Reformasi dan Penyederhanaan Biroksi
5. Penguatan Karakter Agamis

Selanjutnya dari Tema tersebut disusun Prioritas Daerah Kabupaten Banjar tahun 2025 yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) prioritas yakni :

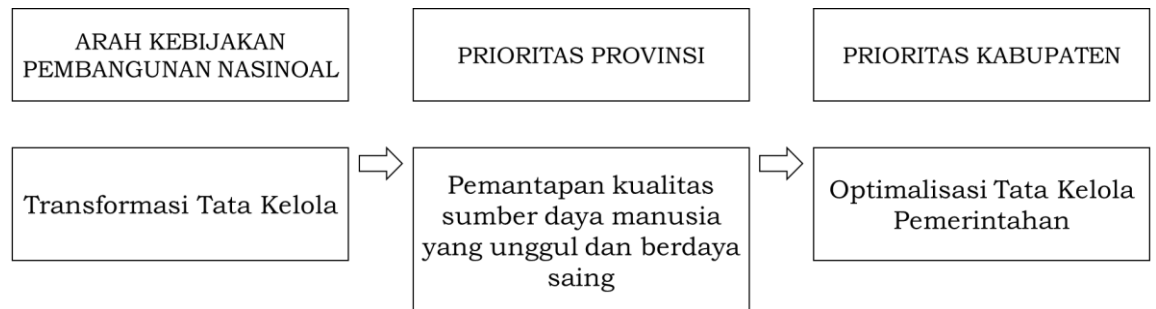
1. Meningkatkan Ekonomi Inklusif berbasis Perikanan, Pertanian dan Pariwisata
  - a. Peningkatan investasi di Kabupaten Banjar melalui realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan
  - b. Pengembangan pariwisata yang mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata, baik lokal, regional maupun internasional
  - c. Mengembangkan ekonomi kreatif yang mampu mendorong peningkatan UMKM berbasis sumber daya lokal dan digital
  - d. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang mampu mendorong ketahanan pangan daerah dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan
  - e. Penurunan kemiskinan ekstrem melalui inovasi program komplementer, penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antar sektor terkait, dan penguatan kemitraan pemerintah daerah dengan sektor bukan pemerintah
  - f. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) dalam upaya penguatan pasar lokal
  - g. Peningkatan upaya penciptaan lapangan pekerjaan mandiri berbasis potensi dan sumber daya lokal
  - h. Penajaman strategi ekspor dan impor dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan daerah
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkarakter
  - a. Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), khususnya pada angka partisipasi terhadap Sekolah Menengah Pertama
  - b. Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan bayi, khususnya pada layanan preventif dan edukatif bagi, remaja putri, ibu hamil dan menyusui

- c. Peningkatan upaya pencegahan pernikahan anak melalui edukasi dan advokasi bagi orangtua dan ada
  - d. Peningkatan upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kader dan intervensi gizi spesifik dan sensitive
  - e. Peningkatan cakupan kesehatan semesta (UHC) melalui strategi yang kolaboratif dan sinergi antar pemangku kepentingan
  - f. Mendorong penyediaan pangan, khususnya penyediaan pangan bahan pokok dan penting dengan harga terjangkau
  - g. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui gerakan memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular
  - h. Peningkatan penyelenggaraan event keagamaan dan kebudayaan dalam upaya mendorong karakter religius dan agamis
  - i. Pembentukan pemuda berkarakter
  - j. Peningkatan partisipasi pemuda dan santri dalam pembangunan daerah dan olahraga
  - k. Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - l. Peningkatan Penguatan Kasus Pelanggaran Kentraman dan Ketertiban Umum
3. Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar
- a. Peningkatan layanan infrastruktur dasar yang mendorong pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat
  - b. Peningkatan layanan infrastruktur, sarana dan prasarana wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah

- c. Peningkatan pembangunan berbasis kawasan strategis (prioritas) dan perdesaan yang mendorong pemerataan ekonomi wilayah
- 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
  - b. Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sektor-sektor pendapatan
  - c. Pengembangan Satu Data untuk pembangunan dan informasi statistik
  - d. Peningkatan Kompetensi ASN sebagai upaya terwujudnya ASN yang profesional dan BERAHLAK
  - e. Penerapan Sistem renumerasi yang lebih adil dan kompetitif
  - f. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan pencegahan korupsi
- 5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana
  - a. Peningkatan pengelolaan kebencanaan berbasis mitigasi dan rehabilitasi yang sinergi dan kolaboratif antar pemangku kepentingan
  - b. Peningkatan pengendalian pencemaran, kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dari penjelasan diatas, maka Kecamatan .... mengampu Prioritas Kabupaten ke 4 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi dan penyederhanaan birokrasi.

Secara Garis besar, akan terdapat sinkronisasi antara Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan Prioritas Kabupaten Banjar dalam hal Prioritas Pembangunan yang diampu oleh Kecamatan .... sebagaimana gambar dibawah ini.



Berdasarkan uraian di atas, Kecamatan Sungai Pinang berdasarkan urusan yang diampunya dan berdasarkan tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan publik, maka Kecamatan Sungai Pinang masuk ke dalam prioritas 5 dari Tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Sungai Pinang Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah dicapai diukur melalui indikator program, kegiatan dan subkegiatan.

Memperhatikan Perubahan Renstra Kecamatan Sungai Pinang 2021 - 2026, maka dapat diketahui tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2025 yaitu mengarah kepeningkatan pelayanan publik sesuai dengan misi 4 Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif yang diemban Kecamatan Sungai Pinang

**Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Pinang**

<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis</b>
<b>Misi</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih Dan Efektif</b>
<b>Tujuan</b>	<b>Terselenggaranya Reformasi Dalam Pelayanan Publik</b>
<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>
<b>Sasaran</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan</b>
<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Nilai Evaluasi Kecamatan</b>
<b>Target Tahun 2025</b>	<b>85 ( Indeks/ Nilai / Skor )</b>

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sungai Pinang yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik, Kecamatan Sungai Pinang menetapkan sasaran yaitu: ***Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan***. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa . Untuk target pada Rancangan Kerja (Renja) 2025 adalah sebesar 85 (Indeks/ Nilai/ Skor)

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya misi 4 “Penyelenggaraan Kepemerintah yang Amanah, baik, bersih dan efektif”, maka untuk mewujudkan hal tersebut ditentukanlah program dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas sebagai rencana aksi dari Kecamatan Sungai Pinang untuk mendukung salah satu prioritas daerah yaitu transformasi



pelayanan publik yang melayani, selain juga pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan tentunya dipilih untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ini juga mengacu pada program dan kegiatan serta sub kegiatan yang telah dirumuskan di RKPD 2025.

Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar disusun program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4.1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.5.5. Fasilitas Kunjungan Tamu

1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1. Pengadaan Mebel

1.6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

2.1.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2.2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

### 3.PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

#### 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

#### 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.1.2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

#### 4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

### 5.PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

#### 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

## 6.PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

### 6.1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

6.1.2. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.3. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

6.1.4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

6.1.5. Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

### **3.3.1.Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan**

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan adalah terkait dengan dukungan terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah, dimana Kecamatan mendukung pencapaian Misi 4 Yaitu :

***“Kepala Daerah yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif”***

### **3.3.2.Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

1. Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pinang di tahun 2025 adalah sebanyak 6 (Enam) Program dengan 15 (Lima Belas) kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 1 Program dengan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan.
2. Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan, pada umumnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan

Sungai Pinang sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sungai Pinang dan melingkupi semua Desa.

3. Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk membiayai belanja langsung program dan kegiatan seluruhnya dari APBD Kabupaten Banjar sebesar Rp. 2.787.546.288,00- (Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah ).
4. Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Sungai Pinang sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik itu jenis program/ kegiatan. Adapun perbedaan satuan target dan pagu dana di beberapa program/kegiatan/subkegiatan, perbedaan ini terjadi karena adanya karena adanya penyesuaian perubahan pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Barang Unit (SBU) yang ditetapkan pada tahun 2025 di Kecamatan Sungai Pinang
5. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan beberapa program/ kegiatan ada pagu indikatifnya yang lebih besar maupun lebih kecil daripada rancangan awal RKPD, hal ini dikarenakan adanya pengurangan penyesuaian jenis belanja yang menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD termasuk didalamnya adanya penambahan anggaran terkait gaji dan tunjangan ASN.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI PINANG**

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel di bawah berisi program prioritas daerah dan program perangkat daerah serta program pendukung untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sungai Pinang dan RPJMD Kabupaten Banjar.

Jumlah seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pinang di tahun 2025 adalah sebanyak 6 (Enam) Program dengan 15 (Lima Belas) kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian sasaran SKPD sebanyak 6 (Enam) Program dengan 15 (Lima Belas) kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) sub kegiatan.

Total rencana kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan tahun 2025 ini adalah sebesar Rp. 2.787.546.288,00- (Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah ).

Selanjutnya terkait dengan rumusan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kecamatan Sungai Pinang untuk Tahun Anggaran 2025 bisa dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 dan  
Perkiraan Maju Tahun 2026**

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sungai Pinang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SUNGAI PINANG						2.787.546.288,00							2.807.265.296,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.787.546.288,00							2.807.265.296,00	
	7.01	KECAMATAN						2.787.546.288,00							2.807.265.296,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang Persentase Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintah	80,00 Persentase 80,00 80 Persen			100 % 78,00 78,00 Persentase 78 Persen	2.478.354.188,00						80,00 Persentase 80,00 80 Persen	2.495.476.136,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	-			100% Persentase	8.207.000,00				04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.218.200,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	1.107.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.118.200,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.100.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		2.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100% Persentase	1.861.576.128,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-	-	1.866.736.128,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														





## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1.811.216.128,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-		1.811.216.128,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	49.560.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		54.720.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	800.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		800.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun				100% Persentase	12.350.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		12.350.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	350.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	12.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	-			100% Persentase	25.770.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	25.770.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	770.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		770.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	25.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-		25.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100% Persentase	123.793.800,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	130.098.800,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	739.500,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		749.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.305.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-		4.326.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.500.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-		3.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.760.300,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		2.763.300,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	5.489.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		5.510.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-		113.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	-			100% Persentase	85.512.000,00			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-	-	89.734.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	17.888.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimali sasi Tata Kelola Pem erintahan	-		22.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	67.624.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		67.634.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100% Persentase	223.671.260,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	224.145.008,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.750.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.750.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	52.786.260,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		52.795.008,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	169.135.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		169.600.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	-			100% Persentase	137.474.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	138.424.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	83.800.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		83.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	19.930.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		20.880.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	33.744.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	33.744.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana IKM Kecamatan Sungai Pinang	100 100 Persen 100% Perse ntase			100 100 Persen 100% Persentase 84,00 %	42.648.800,00						100 100 Persen 100% Perse ntase	43.852.000,00	





## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			100% Persentase	20.302.800,00				04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.651.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	20.302.800,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	20.651.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	-			100% Persentase	22.346.000,00				04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	23.201.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	22.346.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		23.201.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/ MusKel yang tepat waktu Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persen 100% NA			100 %100% NA100 Persen	60.796.000,00						100 Persen 100% NA	60.888.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	-			100% Persentase	60.796.000,00				04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	60.888.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				21 Lembaga Kemasyarakatan	7.932.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		7.933.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	52.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		52.955.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Penanganan Tramtbumulinas Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100% NA 100 Persen			100 % 100% NA 100 Persen	24.957.000,00						100% NA 100 Persen	25.032.460,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	-			100% Persentase	20.196.500,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-	-	20.259.460,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	11.535.500,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-		11.595.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	8.661.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		8.663.960,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-				4.760.500,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-	-	4.773.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	4.760.500,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-		4.773.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Angka stabilitas keamanan lokal Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 % 100% NA			0 % 100 % 100% NA	153.069.900,00						100 % 100% NA	154.134.500,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	-			100% Persentase	153.069.900,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	154.134.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	58.064.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		59.128.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	95.005.900,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		95.006.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100% 100 %	NA		100 % 100% NA	27.720.400,00						100% 100 %	27.881.700,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	-			100% Persentase	27.720.400,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	27.881.700,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1.991.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.998.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1.847.700,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.848.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	2.308.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		2.335.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														



## Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-		19.810.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1.773.700,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.890.700,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	JUMLAH							2.787.546.288,00								2.807.265.296,00

**Sumber: Renja SIPD- ri Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 yang berisi program/ kegiatan/ subkegiatan beserta indikator dan targetnya disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Sungai Pinang dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2025.

Renja Kecamatan Sungai Pinang ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPJMD Kabupaten Banjar di tahun 2025.

Dalam hal ini ketersediaan anggaran sangat diperlukan prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja, sasaran, indicator sasaran pada Renstra 2021- 2026 Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Kecamatan Sungai Pinang untuk membuktikan kinerja dan untuk memperbaiki kinerja.

Demikian penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2024 untuk selanjutnya dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan untuk seluruh pihak yang terlibat.

#### **5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian**

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, pada Tahun 2025 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Banjar., Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.



## 5.2. Kaidah- kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renja ini, harus memenuhi kaidah-kaidah yang bersifat optimalisasi perwujudan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kaidah-kaidah itu meliputi

- Efisien-efisien efektif
- Mengacu pada pola Peraturan Perundang-undangan
- Sinergitas internal SKPD atau external di luar SKPD
- Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- Konsistensi terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Renja

## 5.3. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan kinerja tahunan dengan menyelaraskan target target yang disusun sehingga menjadi penyebab / memiliki hubungan kausalitas dalam terwujudnya outcome atau hasil hasil program/
- Melakukan pemantauan Capaian Target Jangka Menengah yang ada dalam Renstra dengan menindaklanjuti perbaikan atas capaian target tahunan yang berjalan dan akan melakukan perbaikan terhadap indikator program atau kegiatan yang belum sesuai dengan sasaran.
- Memanfaatkan Dokumen Renja Tahunan dan sebagai dasar/ acuan untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya

Sungai Pinang, 29 Juli 2024

Camat Sungai Pinang



MARWATA, SE

NIP. 19690217 198903 1 003



## **LAMPIRAN**



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN SUNGAI PINANG KAB. BANJAR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SUNGAI PINANG						2.787.546.288,00							2.807.265.296,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.787.546.288,00							2.807.265.296,00	
	7.01	KECAMATAN						2.787.546.288,00							2.807.265.296,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Pinang Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah	80,00 Persentase 80,00 80 Persen			100 % 78,00 Persentase 78 Persen	2.478.354.188,00						80,00 Persentase 80,00 80 Persen	2.495.476.136,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD				100% Persentase	8.207.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		8.218.200,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	1.107.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.118.200,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-		5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.100.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		2.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100% Persentase	1.861.576.128,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-		1.866.736.128,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1.811.216.128,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-		1.811.216.128,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	49.560.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		54.720.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	800.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		800.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	-			100% Persentase	12.350.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	12.350.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	350.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		350.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	12.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang	-		12.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

										UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan					
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	-				100% Persentase	25.770.000,00		-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-		25.770.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen	770.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	770.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					2 Orang	25.000.000,00	Kab. Banjar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100% Persentase	123.793.800,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	130.098.800,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	739.500,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	749.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1.305.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.326.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	3.500.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	2.760.300,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.763.300,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					10 Laporan	5.489.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.510.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	113.250.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	-				100% Persentase	85.512.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	89.734.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	17.888.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-	22.100.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	67.624.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan			67.634.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100% Persentase	223.671.260,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		224.145.008,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.750.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		1.750.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	52.786.260,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		52.795.008,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	169.135.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		169.600.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	-			100% Persentase	137.474.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		138.424.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	83.800.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		83.800.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	19.930.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		20.880.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	33.744.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.744.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
2, 7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana IKM Kecamatan Sungai Pinang	100 100 Persen 100% Perse ntase			100 100 Persen 100% Persentase 84,00 %	42.648.800,00					100 100 Persen 100% Perse ntase		43.852.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-			100% Persentase	20.302.800,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		20.651.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	20.302.800,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		20.651.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Koordinasi Kegiatan Kesos Yang Dilaksanakan	-			100% Persentase	22.346.000,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-		23.201.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

	7.01.02.2.04.0003		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							1 Laporan	22.346.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-				23.201.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan MusDes/ Muskel yang tepat waktu Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 Persen 100% NA						100 % 100% NA 100 Persen	60.796.000,00						100 Persen 100% NA			60.888.500,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana	-						100% Persentase	60.796.000,00				04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-			60.888.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							21 Lembaga Kemasyarakatan	7.932.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-				7.933.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							2 Laporan	52.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-				52.955.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penanganan Tramitbumlinmas Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	100% NA 100 Persen						100 % 100% NA 100 Persen	24.957.000,00						100% NA 100 Persen			25.032.460,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	-						100% Persentase	20.196.500,00				04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-			20.259.460,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							2 Laporan	11.535.500,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-				11.595.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							1 Laporan	8.661.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-				8.663.960,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-							4.760.500,00				04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-			4.773.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																				
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							1 Laporan	4.760.500,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-				4.773.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Angka stabilitas keamanan lokal Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 % 100% NA						0 % 100 % 100% NA	153.069.900,00						100 % 100% NA			154.134.500,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	-						100% Persentase	153.069.900,00				04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-	-			154.134.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,							40 Orang	58.064.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-				59.128.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	



Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025

			Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan				
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	95.005.900,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-			95.006.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100% NA 100 %			100 % 100% NA	27.720.400,00						100% NA 100 %		27.881.700,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	-			100% Persentase	27.720.400,00			-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-			27.881.700,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1.991.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-			1.998.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1.847.700,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-			1.848.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	2.308.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-			2.335.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-			19.810.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1.773.700,00	Kab. Banjar, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	-			1.890.700,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
			J U M L A H					2.787.546.288,00								2.807.265.296,00	



KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X								
X	X							
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
X	XX	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	XX	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
7	01	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
7	01	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan





7	01	01	203		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
7	01	01	203	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
7	01	01	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
7	01	01	205		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
7	01	01	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
7	01	01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
7	01	01	206		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
7	01	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
7	01	01	207		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit



7	01	01	208		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7	01	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
7	01	01	209		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
7	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
7	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01	KECAMATAN						
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>			
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>			
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan

7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>			
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			

7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KINERJA (RENJA)  
KECAMATAN SUNGAI PINANG  
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA (RENJA)  
KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : Juli 2024

Kabid Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia

Kasubbid Pemerintahan  
kecamatan

FARA HAYANI, S.P.  
NIP. 197202251999032008

NURYAMI, SE, MM  
NIP. 197506061995032004

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDALITBANG  
KABUPATEN BANJAR

NASHRULLAH SHADIQ, S.Hut., M.Si  
NIP. 197409232000031004



**KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG**

**KABUPATEN BANJAR**

**NOMOR : 1.1      TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA ( R E N J A )  
KECAMATAN SUNGAI PINANG  
TAHUN 2025**

- Menimbang a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang diartikan sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini dan demi lebih efektif dan terarahnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Sungai Pinang Kabupaten Banjar.
- Mengingat 1. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LNRI Tahun 1953 Nomor 09, TLNRI Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021).



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2025 dimaksud dalam Diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PINANG

PADA TANGGAL : 01 JULI 2024



**CAMAT SUNGAI PINANG,**

**MARWATA, SE**

**Pembina /IV.a**

**NIP. 19690217 198903 1 003**

Lampiran I : Keputusan Camat Sungai Pinang Kabupaten Banjar  
No : 1.1 Tahun 2024  
Tanggal : 01 Juli 2024

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN SUNGAI PINANG  
KABUPATEN BANJAR  
TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat	PenanggungJawab
2	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset	Sekretaris
4	Kasubbag Umum dan Kepegawain	Anggota
5	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Sungai Pinang  
pada tanggal : 01 Juli 2024

**CAMAT SUNGAI PINANG,**



**MARWATA, SE**  
**Pembina /IV.a**  
**NIP. 19690217 198903 1 003**

Lampiran II : Keputusan Camat Sungai

Pinang Kabupaten Banjar

No : 1.1 Tahun 2024

Tanggal : 01 Juli 2024

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN SUNGAI PINANG  
KABUPATEN BANJAR  
TAHUN 2025**

**1. Penanggungjawab :**

- Bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh tim penyusun Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025;
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025;
- Menerima laporan hasil pekerjaan tim penyusun Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025;
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

**2. Ketua :**

- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025;
- Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusun Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025;
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusunan kepada penanggungjawab tim penyusun Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

**3. Sekretaris :**

- Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas tim penyusun Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025;
- Melaksanakan penyempurnaan Renja Kecamatan Sungai Pinang atas hasil telaahan, koreksi dan masukan tim penyusun Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025;
- Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025 sesuai dengan dokumen RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2025 yang telah ditetapkan;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

#### 4. Anggota :

- Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappedalitbang tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Sungai Pinang;
- Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang;
- Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Banjar tahun 2025;
- Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025;
- Melakukan analisis terhadap kebutuhan perencanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2025;
- Merumuskan kegiatan prioritas Renja Kecamatan Sungai Pinang tahun 2025;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Pinang

pada tanggal : 01 Juli 2024



**CAMAT SUNGAI PINANG,**

**MARWATA, SE**  
**Pembina /IV.a**

**NIP. 19690217 198903 1 003**